



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAT JAYA
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 249121

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 669.740.000

1. Tanah Seluas 4384 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 605 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 42.540.000
3. Tanah Seluas 1197 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 59.900.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 353 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/106 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 164.920.000
7. Tanah Seluas 1238 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 12.380.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 320.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2 Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 716.311.461

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.706.051.461



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.706.051.461

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.